

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi kasus pada SD Negeri Curahmalang III periode 2018)

Oleh : *Eni Purwanti*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang

E-mail : enipur27@gmail.com

Abstrak

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Tujuan dana BOS adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan/melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana BOS di SD Negeri Curahmalang III sudah baik dapat dilihat dari tingkat transparansi dalam pengelolaan dana BOS sudah baik terbukti dengan ditempelnya hasil laporan keuangan di papan pengumuman sehingga semua warga sekolah dapat mengetahui pengelolaan dana yang ada di sekolah.

Kata Kunci: Dana BOS, Akuntabilitas

Abstract

School grants program is an assistance from the government to exempt from education cost for destitute students and other students, in order to they can receive not only a better education in basic but also for performing a study up to 9 years. The aim of school grants program is to provide funding for non personnel operating costs for basic education units as the implementing compulsory education programs.

This research uses descriptive qualitative method, it describes the object of the research based on the real situation or the fact. The technique to collect the data uses observation, interview and documentasion. The techniques for analyzing the data use data reduction, data presentation, and verification.

The result indicates the accountability of the budget management of school grants program in curahmalang III elementary school is, it can be seen from the level of transparency in managing of school grants program that har been proven by pasting the results of the financial statement on the bulletin board and all the school members can understand the management of the funds in the school.

Key word: school grants program, accountability

A. PENDAHULUAN

Di era sekarang ini, pendidikan merupakan hal yang penting bagi semua orang karena pendidikan merupakan akar dari peradaban sebuah bangsa. Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang agar dapat menjawab tantangan kehidupan. Untuk memperoleh pendidikan banyak cara yang bisa ditempuh, diantaranya melalui pendidikan formal dan non-formal.

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggambarkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, Sedangkan ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah

dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang – Undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan.

Program BOS yang memberikan bantuan dana untuk kegiatan operasional sekolah dalam jumlah yang cukup besar, khususnya untuk sekolah-sekolah di daerah perdesaan dan sekolah-sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari kalangan menengah kebawah, telah mengubah struktur pendanaan sekolah secara signifikan.

Biaya pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), sumbangan, swasta, dan orang tua siswa. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN maupun APBD seperti diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 yaitu “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada BAB XIII mengenai pendanaan pendidikan, bagian ketiga tentang Pengelolaan Dana Pendidikan pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Artinya pengelolaan dana dalam pendidikan yang berawal dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas. Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kebijakan pemerintah dalam mengelola program BOS telah memberikan banyak manfaat dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa. Hal ini tampak jelas dengan turunnya sejumlah pungutan dan dibebaskannya SPP terutama di level sekolah dasar. Pengelolaan dana BOS meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan perencanaan. Namun pengelolaan keuangan dana BOS faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem pengelolaan dana BOS sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS

Fakta yang terjadi dilapangan mengenai pengelolaan dana BOS yaitu: banyak sekolah swasta yang masih melakukan pungutan iuran terhadap siswa, pada sisi lain sekolah tersebut mendapat kucuran dana BOS. Padahal menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO 44 Tahun 2012, pasal 1 ayat 2 dijelaskan, “pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar”

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Dalam rangka implementasi penerapan MBS di sekolah, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang

berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. RUMUSAN PENELITIAN

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN Curahmalang III?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN Curahmalang III?

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk dijadikan referensi dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya terkait akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN Curahmalang III.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi sekolah, adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mengelola dana BOS yang baik agar terpenuhinya kebutuhan sekolah dan kualitas pendidikan yang baik.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penilaian guna meningkatkan kepekaan sosial dengan berkontribusi untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah dana di sekolah.
- c. Bagi Instansi Pemerintahan, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengambilan kebijakan yang lebih bijak mengenai pemberian dana sekolah provinsi.

E. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Akuntabilitas

“Mardiasmo (2002;20) mengemukakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pertanggung jawaban dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Santi Ekowati (2016) Tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

1. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2002:105) prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan adalah Transparansi, akuntabilitas dan *value for money*, sama halnya dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sekolah juga harus menjalankan pengelolaan keuangannya dengan memakai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

Menurut Umi (2018), “Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.”

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan dibidang manajemen keuangan sekolah berarti adanya keterbukaan akan kebijakan-kebijakan keuangan,

keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, keterbukaan penggunaan serta pertanggungjawabannya sehingga memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

2. Standar Kinerja

Standar kinerja merupakan bagian penting dalam proses perencanaan manajemen sekolah. Standar kinerja berkaitan dengan gambaran kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tujuan instansi yang tercantum dalam juknis BOS. Tujuan instansi telah ditetapkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh Komite Sekolah yang mengacupada peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana BOS disampaikan secara tertulis kepada Guru dan Wali Murid disertai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan demi tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Penetapan dan implementasi standar kinerja melibatkan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru dan Wali Murid yang akan bekerjasama untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Standar kinerja akan mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan untuk lebih efektif dan efisien.

3. Partisipasi

Menurut Ita Rakhmawati (2018) partisipasi merupakan hak sekaligus kewajiban seseorang dalam kaitannya untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan kelompok. Tingkat partisipasi yang diberikan oleh setiap partisipan akan memiliki derajat kekuatan tersendiri. Semakin tinggi tingkat derajat partisipan menunjukkan semakin besar peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan.

Bukan hanya transparansi, dalam pengelolaan dana BOS partisipasi juga mempunyai peranan besar dalam sekolah dari berbagai unsur, salahsatunya adalah masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah dan Wali Murid.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. “Menurut sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, merupakan data yang didapat melalui penjelasan kata verbal dan tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian ini data kualitatif memberikan gambaran mengenai objek penelitian yang menunjukkan kualitas objek penelitian.

3. Sumber Data

- a. Data Primer : Data yang bersumber dari informan secara langsung yang di temui di lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder : sumber yang tidak langsung memberikan data/informasi kepada peneliti yang di peroleh dari pihak lain selain sumber primer, dan berfungsi sebagai data pendukung penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi : kemampuan seorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Metode

observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Dalam observasi disini, observasi digunakan untuk memperoleh data tambahan terkait dengan pengelolaan dana BOS.

- b. Wawancara : alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.
- c. Dokumentasi : pencarian data awal untuk melihat keadaan/ suatu kondisi. Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010) teknik analisis data kualitatif yang digunakan yaitu Miles dan Huberman yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data : yaitu pencarian data-data yang diperlukan sesuai dengan kondisi ditempat penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa laporan keuangan, laporan mutasi piutang, dan dokumen lain yang mendukung penelitian.
- b. Reduksi Data : data yang diperoleh dari lokasi penelitian akan segera dianalisis melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- c. Penyajian Data : yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat.
- d. Menarik Kesimpulan : yaitu kesimpulan awal yang bisa berubah dan masih bersifat sementara jika tidak menemukan bukti yang kuat untuk menemukan permasalahan yang ada.

G. PENUTUP

1. Simpulan

Akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana BOS di SD Negeri Curahmalang III sudah cukup baik dapat dilihat dari transparansi, standar kinerja dan partisipasi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan juknis yang ada.

2. Saran

- a. Kepada pengelola BOS diharapkan untuk memantau penggunaan dana BOS, dan melakukan pemantauan terhadap proses akuntabilitas keuangan agar dapat melaksanakan aturan-aturan yang berlaku sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang berkualitas.
- b. Sekolah diharapkan dapat memberitahu mengenai laporan penggunaan dana BOS untuk apa saja agar orang tua siswa mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, R. D. (Mei - Agustus 2013). *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X*, 1-8.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah. (2009).

Juknis BOS. (2019).

Laila, U. N. (2018). Analisis prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Malang.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.